

Aturan Calon Tunggal Pilgub Perlu Dikaji Ulang

SEMARANG - Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip, Teguh Yuwono memandang aturan calon tunggal dalam pesta demokrasi perlu ditinjau kembali. Aturan calon tunggal dianggap membodohi publik lantaran masyarakat dipaksa memilih antara peserta pemilu manusia dengan kotak kosong.

Kondisi di Jateng yang masih krisis calon bagi partai selain PDI Perjuangan berpotensi membuat Jateng hanya memiliki calon tunggal. "Calon tunggal adalah salah satu pilihan yang tidak benar dalam berdemokrasi. Karena demokrasi harus ada pilihan, dan pilihan harus seimbang. Kalau yang dipilih adalah orang, maka saingan yang dipilih juga orang, bukan malah memilih kotak kosong. Ibarat memilih, satu memilih gelas berisi teh, satu disuruh memilih gelas kosong, tidak ada manfaatnya," terang Teguh di Hotel Grand Candi Jalan Sisingamangaraja belum lama ini.

Regulasi yang terbilang unik tersebut justru dianggap membuang waktu dan membebani

anggaran negara. Ia mengangap perhelatan memilih kotak kosong seperti di Kabupaten Pati dalam Pilkada serentak 2017 adalah hal yang sia-sia. Semeskipun, jika tidak ada pesaing bagi calon yang berani maju menjadi peserta Pilkada, maka semeskipun langsung ditetapkan dan dilantik sebagai kepala daerah.

"Di Indonesia, aturan calon presiden tunggal tidak diperbolehkan. Presiden harus didukung di bawah 80 persen kekuatan di DPR RI. Namun untuk Gubernur dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota malahan diperbolehkan. Ini juga yang harusnya dikaji untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem yang lebih mendedik. Meski pun sebenarnya calon tunggal juga merupakan salah satu kemunduran demokrasi karena kegagalan pengkaderan," ulasnya.

Di Jawa Tengah sendiri, potensi memunculkan calon tunggal dalam Pilgub 2018 adalah hal yang memungkinkan. Hal itu bisa terjadi mana kala partai politik selain PDI Perjuangan

tidak segera menguatkan nyalinya mengusung figur yang bisa menyaingi petahana. Sejauh ini, hanya ada beberapa nama yang santer disebut oleh beberapa partai, itu pun merupakan tokoh yang datang dari

pusat.

"Kalau (partai) non PDIP tidak memiliki nyali melawan PDIP, bisa berpotensi menjadi calon tunggal. Kalau mereka merasa PDIP dan petahana adalah calon yang kuat, kemu-

dian mereka tidak memiliki niat melawan maka bisa saja seperti di Pati," ungkap Teguh.

Hal tersebut juga bisa disaksikan karena belum terbentuknya poros dukungan di luar PDIP. Dorongan partai

untuk mematangkan dukungan terhadap tokoh yang akan diusung juga perlu segera dilakukan mengingat selama ini hanya PDIP yang terus meramaikan Pilkada. ■

M9-yan